BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang APBN nomor 42 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008, Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu dan untuk mengambil keputusan dan menunjukan akuntabilitas entitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan (Indra Bastian, 2007:388).

Penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja sangat dipentingkan karena pada peraturan pemerintah setiap Departemen Pekerjaan Umum wajib melaksanakan dan menyampaikan laporan keuangan serta kinerja instansi pemerintahan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan pemerintah Menteri Pekerjaa Umum Nomor 02/PRT/M/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum serta peraturan/surat peredaran yang diterbitkan di lingkungan Departemen Pekerjaan

Umum, setiap Kepala Satuan Kerja selaku kuasa penggunaan Anggaran/Barang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan-laporan (Petunjuk Operasional Kegiatan Satker, 2011). Disamping itu, satuan kerja juga harus menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBN.

Sesuai dengan peraturan undang-undang pemerintahan pasal 34 bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada perturan perundang-undangan, efisien, ekonomi efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (Peraturan Pemerintah Nomor 24, 2005). Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pusair merupakan badan usaha milik negara yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan negara yang ruang lingkupnya berdasarkan Undang-undang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Puslitbang SDA) adalah entitas akuntansi dari Departemen Pekerjaan Umum yang berkewajban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Petunjuk Operasional Kegiatan Satker, 2011).

Penyusunan laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keungan Pemerintahan Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Laporan keuangan anggaran Satker, 2009:7).

Pelaksanaan atau penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja di Pusair ini, menggunakan metode SAI (Sistem Akuntansi Intansi), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), namun dalam standar akuntansi Badan Penelitian dan Pengembangan PU tahun 2009 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (Laporan Akhir Pengendalian dan Pengawasan Sistem Keuangan, 2010).

Laporan Keuangan Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pusat Litbang Sumber Daya Air. Dan Pusat Litbang Sumber Daya Air pun memperoleh anggaran yang berasal dari APBN.

Laporan Keuangan tahunan yang disajikan di Pusair, seperti Laporan Realisasi Anggaran yang dapat memberikan informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, realisasi pendapatan Negara dan Hibah pada semester I apabila di lihat dalam laporan interim tahun anggaran 2009 adalah sebesar 43.86%, dari

yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009 sementara itu, realisasi belanja negara adalah sebesar 28.72% dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar 45%. Adapun Neraca yang disajikan yang dapat memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementrian Negara/Lembaga Tahunan, dari nilai asetnya sebesar 75%, dan kewajiban sebesar 53%, sehingga ekuitas dana (kekayaan bersih) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air semester I adalah sebesar 73%. Dan catatan atas laporan keuangan disini dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal - hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, (Laporan keuangan anggaran Satker, 2009 : 5).

Penyusunan laporan keuangan pun di Pusair ini sudah memakai sistem pelaporan secara elektronik (*E-monitoring*) yaitu salah satu metode dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja selain metode SAI, sehingga untuk menghasilkan informasi laporan keuangannya berbagai tahap mulai dari pengeluaran dan pembayaran dengan menggunakan aplikasi tersendiri sesuai alur terjadinya bukti laporan keuangan yang sesungguhya, sehingga terbentuknya laporan keuangan seluruhnya yang dapat menjadi informasi keuangan Pusair (Petunjuk Operasional Kegiatan Satker, 2011).

Penyusunan laporan keuangan Satker mengikuti aturan yang telah disesuaiakan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan perbendaharaan

No.66 dalam pelaksanaan penyelenggaraan APBN, (Peraturan Dirjen perbendaharaan No. 66, 2005). Adapun permasalahan atau kendala yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan biasanya disebabkan karena keterlambatan realisasi anggaran dan juga kelebihan anggaran dalam pengluaran biaya-biaya, serta dalam mekanisme pembayaran dana adanya keterlambatan baik rencana dana maupun dalam pertanggungjawaban atas pengguna dana tersebut dalam pelaksanaan anggaran, kekurang pahaman dalam mekanisme penggunaan anggaran atau dalam posting kode anggaran yang telah ditentukan dalam dokumen anggaran seperti kerangka acuan kerja, RKA-KL, atau DIPA, adanya ketidak sesuaian besaran anggaran dengan realisasi kebutuhan yang mengakibatkan perlunya revisi RKA-KL/DIPA, dan kendala atau permasalahan pada metode *e-monitoring* dan SAI biasanya yang terjadi di karenakan program aplikasi e-*monitoring* karena jarang ter-*update* program tersebut, sehigga dapat menghambat untuk menyusun laporan keuangan akhir.

Di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA yang didukung oleh Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), seringkali tidak semulus dengan yang diharapkan, seperti kesulitan dalam penggabungan data keuangan yang telah dibelanjakan dengan data barang yang diperoleh, terutama untuk belanja aset. Implikasi-implikasi di atas dimungkinkan oleh bebarapa hal seperti, ketidakpastian jadwal pelaksanaan anggaran dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran dana, sehingga adanya pemantauan pelaporan keuangan pada satuan kerja, agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipantau dengan baik, pemantauan itu sendiri

menggunakan metode *e-monitoring* dan adanya keterlambatan baik rencana penarikan dana maupun dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam pelaksanaan anggaran (Laporan Akhir Pengendalian dan Pengawasan Sistem Keuangan, 2010).

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan di Satuan kerja Pusair, sehingga penulis mengambil judul **"Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air"**.

1.2 Maksud dan Tujuan kerja praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil kerja praktek di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, untuk dijadikan bahan dalam penyusunan laporan kerja praktek, serta untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air tersebut.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan diadakannya kerja praktek, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Pusat Litbang Sumber Daya Air.

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Pusat Litbang Sumber Daya Air.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja pusat penelitian dan pembangunan sumber daya air.

1.3 Kegunaan Hasil Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagaimana masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Pusair.

2. Bagi Perusahaan

   Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan perusahaan Pusair.

3. Bagi Pihak Lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi bagaimana metode laporan keuangan pada Departemmen Pekerjaan Umum terutama pada Pusair ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

a. Pengamatan (*Observation*)

   Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

b. Wawancara (*Interview*)

   Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara Tanya-jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek ini di Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, yang bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No. 193 Bandung. Sedangkan waktu Kerja Praktek yang dilakukan dalam satu bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 25 Agustus 2011. Hari Kerja Praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pukul 10.00 – 16.00 WIB.